

## PENGUATAN EKONOMI UMAT MELALUI LEMBAGA KEAGAMAAN

Moch. Khoirul Anwar

Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

### البحث

الإسلام هو الدين الذي يعلم الناس إلى قوة في الاقتصاد. هذا الجانب الاقتصادي مهم جدا، و في أصول الفقه كان واحدا من الأمور المحفوظة التي تشتهر بالأمور الضرورية للناس وهي : الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهذا يناسب الى الغرض من الشريعة هو حكمة البشر في الدنيا والآخرة. من ناحية أخرى، هناك المؤسسات الدينية التي لها القوة المعنوية، لذلك لها دور مهم في التمكين الاقتصادي للشعب. و وجدت في الإسلام المؤسسات التي تتعاملان مباشرة مع الناس وهما مدرسة داخلية و مسجد. ودور المؤسسات الدينية في تمكين الاقتصادي اثنان على الاقل , هما موعظة حسنة و أسوة حسنة . وهما من الأدوار المهمة التي يحتاج بعد ذلك إلى أن تنفذ في النشاط الحقيقي. ودور المؤسسات الدينية في موعظة حسنة يمكن أن تتحقق في شكل زيادة في الموارد البشرية، منها خلال التدريب الجيد، والتعليم، و توفير الحافز على أهمية وجود اقتصاد قوي. ودور المؤسسات الدينية في أسوة حسنة يمكن أن تتحقق في خلال إنشاء "بيت المال و التمويل" . تعامل بيت المال و التمويل على تمكين الاقتصادي بتحويل الأموال من المجتمع والعودة الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا أصحاب المشاريع المسلمين الذين يحتاجون إلى رأس المال لتطوير الأعمال من خلال توفير التسهيلات التمويلية الموافقة على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية مثل المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، القرض، وغير ذلك.

### Prolog

Islam adalah agama yang universal. Ajaran-ajarannya mengatur dan membimbing semua aspek kehidupan manusia, baik yang berdimensi vertikal (*habl min al Allah*) maupun yang berdimensi horizontal (*habl min al Nas*). Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang di dalamnya berisi aqidah, syari'ah, sejarah dan etika (moral), mengatur tingkah laku dan tata cara kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk social. Universalitas ini tampak jelas terutama dalam aspek muamalah yang sangat luas medan gerakannya, bersifat relatif dan fleksibel sesuai dengan situasi, kondisi dan domisili. Ini berbeda secara diametral dengan aspek ibadah (formal) yang bersifat absolut-permanen-konstan dan tak berubah-ubah sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah.

Kaitan antara aspek ibadah formal (dalam arti sempit) dan mua'amalah secara sangat menarik di ilustrasikan dalam surat al-Jumu'ah ayat 9-10 berikut :

9. “*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melakukan sembahyang pada hari jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah tinggalkanlah aktifitas ekonomi. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*”

10. *Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (kelebihan) Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*

Ayat di atas berisi ajaran normatif yang indah sekali mengenai bagaimana seharusnya seorang muslim hidup di muka bumi dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah dan mu’amalahnya. Pertama ditegaskan bahwa ibadah (sholat Jum’at) harus segera ditunaikan ketika waktunya telah tiba, dan semua aktifitas ekonomi harus ditinggalkan, begitu ibadah selesai, manusia diperintahkan untuk segera bermu’amalah kembali (mencari rejeki). Ini menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi diperintahkan oleh ajaran Islam, sebagaimana diperintahkannya aktifitas ibadah. Keseimbangan (*equilibrium*) antara ibadah dan mu’amalah inilah yang selalu ditekankan oleh Islam.

Oleh karena itu, lembaga keagamaan Islam mempunyai tanggungjawab moral dalam pengimplementasian ajaran Islam tersebut. Sudah saatnya, lembaga keagamaan tidak hanya berkuat dalam hal ibadah *mahdhah* yang terkait langsung dengan *habl min Allah* saja, tetapi juga harus memperhatikan aktifitas yang terkait dengan *habl min al-Nas*, di antaranya mempunyai program / kegiatan realistik untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam.

### **Problem Kemiskinan**

Secara singkat, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan pada umumnya yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kesehatan, moral dan rasa harga diri mereka.<sup>1</sup> Di sisi lain, kemiskinan merupakan bahaya besar terhadap stabilitas ketentraman, kesejahteraan dan keamanan masyarakat, bahkan terhadap keimanan seseorang. Apalagi jika kemiskinan tersebut disebabkan ketidakadilan distribusi antara mereka, terjadinya perampasan hak dari sebagian masyarakat kepada yang

---

<sup>1</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan Di Perkotaan; Bacaan untuk Antropologi Perkotaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995), xi.

lain, pengeksploitasian atas komunitas yang tak berdaya, maka hal ini sangat memudahkan timbulnya instabilitas dalam kehidupan di masyarakat, yang pada akhirnya akan meruntuhkan sendi solidaritas dan kasih sayang di masyarakat.

Di daerah pedesaan yang masih mengandalkan mata pencarian bertani akan muncul problem tersendiri, karena dengan nisbah jumlah penduduk dan angkatan kerja yang semakin meningkat dibandingkan dengan luas tanah yang tersedia, maka pemilikan tanah akan semakin kecil dan terpecah-pecah<sup>2</sup>. Akibatnya akan terjadi apa yang kita kenal dengan pengangguran terselubung di daerah pedesaan. Sehingga yang dilakukan oleh sebagian orang pedesaan adalah berbondong-bondong mencari kerja di perkotaan, yang hal ini akan mengakibatkan masalah urbanisasi, karena sebenarnya banyak tenaga kerja di perkotaan yang tidak sepenuhnya produktif sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Di samping itu, tidak kalah pentingnya adalah kemiskinan yang disebabkan secara kultural, di antaranya masih adanya kesalahpahaman terhadap ajaran-ajaran Islam dan filosofi-filosofi budaya (Jawa). Sebagai contoh, ajaran qona'ah, tawakal, sabar, zuhud dan takdir, apabila dipahami secara salah, maka seolah-olah ajaran-ajaran tersebut mengajarkan kemiskinan pada umatnya. Banyak orang yang memahami arti qana'ah sebagai *nriman ing pandum*, menerima **begitu saja** apapun dan berapapun yang diberikan oleh Allah SWT. Ada juga orang yang memahami tawakal dengan *pasrah bongko'an* tanpa adanya usaha. Mereka menganggap kemiskinan adalah sebuah takdir dari Allah yang harus mereka terima begitu saja. Padahal ajaran-ajaran tersebut seharusnya diposisikan sebagai "rem" bagi umat setelah mereka "*ngegas*" yang berupa *ikhtiyar*.

### Penguatan Ekonomi Umat

Kuatnya ekonomi masyarakat merupakan kondisi yang diharapkan, yang mana titik beratnya adalah tercapainya kesejahteraan manusia.<sup>3</sup> Aspek ekonomi ini sangat penting, bahkan dalam *usul al fiqh* ia termasuk salah satu dari lima aspek yang dilindungi, yang terkenal dengan *al-umur al-daruriyah li al-nas* yaitu : agama, jiwa,

---

<sup>2</sup> Apalagi ditambah dengan kecenderungan orang-orang perkotaan (baca: konglomerat) yang berlomba-lomba membeli tanah di pedesaan yang kemudian tidak diperuntukkan untuk lahan produktif, maka hal ini tentunya akan memperkecil pemilikan tanah oleh orang desa itu sendiri.

<sup>3</sup> al-Quran, 2 (*al-Baqarah*) : 21..

akal, keturunan dan harta.<sup>4</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan syari'ah yaitu hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, rahmat, kebahagiaan dan kebijaksanaan. Tindakan apapun yang bertentangan dengan keadilan, dan merubah rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan dan hikmah menjadi kebodohan, maka semua itu tidaklah berhubungan dengan syari'ah Islam.<sup>5</sup>

Memang dalam al-Qur'an terdapat term kelas penindas (*Mustakbirin*) dan kelas tertindas (*Mustad'afin*) yang terdapat konflik di antara mereka<sup>6</sup>, namun ini bukan dalam arti Islam melegalkan konflik sosial. Dalam hal ini agama Islam memberikan tata aturan bagi masing-masing kelas tersebut, yang berupa kewajiban dan hak masing-masing. Dengan kata lain, mereka yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut tidak boleh berlepas tangan, karena mereka punya tanggung jawab masing-masing. Perilaku manusia yang bisa mengakibatkan ketidakberdayaan di bidang ekonomi sangat bertentangan dengan semangat kerja yang dianjurkan oleh Islam. Islam menganjurkan agar manusia memanfaatkan potensi dirinya (Sumber Daya Manusia) dan potensi alam (Sumber Daya Alam) dalam bekerja. Pemanfaatan potensi diri semaksimal mungkin dalam bekerja akan membawa kepada keberdayaan ekonomi manusia sehingga mereka menjadi kelompok yang kuat (berdaya), kelompok yang disukai oleh Allah.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, Sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia berkewajiban membangun dunia dan memanfaatkan sumber daya alamnya dengan cara yang baik dan adil. Dengan demikian, manusia secara individual bertanggung jawab memanfaatkan tenaganya untuk bekerja dalam rangka memakmurkan bumi dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokoknya. Secara otomatis bila kesadaran semacam ini diaplikasikan dalam bentuk kerja, akan membawa dampak positif dan berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan hidup dalam rangka memperdayakan diri di bidang ekonomi.

Di samping itu, manusia merupakan agen dan objek dari pembangunan. Pernyataan ini mempunyai konsekwensi bahwa sumber daya manusia merupakan

---

<sup>4</sup> Wahbah al Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus : *Dar al Fikr*, 1986), 102.

<sup>5</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *A'lam al Muwaqi'in*, Juz III (Beirut : *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 1993), 11.

<sup>6</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam ; Economic And Society* (London And New York : Kegan Paul International, 1994), 74.

<sup>7</sup> al Nawawi, *Sahih Muslim Bi Sarh Imam al Nawawi*, VIII, (Beirut : *Dar al-Fikr*, 1981), 215.

salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah penggerak dalam pembangunan yang mengantisipasi masalah, membuat perencanaan, mempertimbangkan sistem nilai agama dan masyarakat, menggali sumber alam, mengakumulasi dana, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik serta meletakkan semuanya dalam satu wadah pembangunan.

Dalam usaha penguatan ekonomi umat ini, tentunya yang pertama kali dilihat adalah bagaimana penguatan ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9 : *“Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*.<sup>8</sup>

Bentuk dari penguatan ekonomi umat ini bisa dilakukan dengan pengembangan kewirausahaan yang dilakukan oleh sebuah keluarga, sehingga akan tercipta suatu bentuk kemandirian usaha ekonomi produktif. Pada akhirnya akan terwujud suatu keluarga yang lebih dan semakin sejahtera serta mandiri. Di antara indikasi dari keluarga sejahtera ini adalah adanya kemampuan fungsional keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga mampu memberi kontribusi terhadap kebutuhan kehidupan masyarakat.

Akan tetapi, pengembangan kewirausahaan keluarga tersebut tentunya membutuhkan suatu jaminan struktural, dalam hal ini pemerintah, dan lembaga keagamaan yang mempunyai kekuatan moral, untuk mendorong dan memperlancar usaha tersebut. Kegiatan ekonomi produktif khususnya yang dilakukan masyarakat bawah tanpa jaminan struktural, bisa diibaratkan melepas anak kecil di tengah-tengah lalu lintas ibu kota. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam pengembangan usaha produktif tersebut. Kebijakan yang demikianpun masih memerlukan suatu kebijakan perlindungan ekonomi yang tidak hanya diperlukan oleh perusahaan besar ekonomi modern, tetapi justru merupakan suatu hal yang sangat penting dan fungsional bagi masyarakat bawah.

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an, 4 (*al-Nisa'*) : 9.

## Peran Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan, yang mempunyai kekuatan moral dan mendapatkan legalisasi dari umat, mempunyai peranan penting dalam penguatan ekonomi. Hal ini disebabkan karena agama sendiri mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan nasional. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga agama sering dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling *sublime*; sebagai sumber moralitas, sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individu; sebagai sesuatu yang memuliakan dan yang membuat manusia beradab. Untuk itu, pembangunan agama perlu mendapat perhatian lebih besar, baik yang berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan agama, pembinaan pendidikan agama, maupun pelayanan kehidupan beragama, termasuk pemberdayaan lembaga keagamaan dalam rangka menguatkan ekonomi umat.

Dalam prakteknya di masyarakat, lembaga keagamaan biasanya menyangkut hal yang mengandung arti penting tertentu, yaitu menyangkut masalah aspek kehidupan manusia, yang dalam transendensinya, mencakup sesuatu yang mempunyai arti penting dan menonjol bagi manusia. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keagamaan merupakan bentuk asosiasi manusia yang paling mungkin untuk terus bertahan.<sup>9</sup>

Di samping itu, secara personal, lembaga keagamaan terdiri dari para ulama yang sejarah juga telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya sebagai sosok orang yang berilmu, tetapi juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan para ulama telah mendorong mereka untuk selalu aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk masalah perekonomian umat. Terumuskannya sistem ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem perbankan syari'ah, adalah di antara sekian banyak sumbangsih para ulama. Bahkan jauh sebelum perbankan konvensional dikenal, masyarakat sebenarnya sudah biasa melakukan transaksi berdasarkan sistem ekonomi Islam,

---

<sup>9</sup> Thomas F.o'dea, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal* (Jakarta: Rajawali Press, 1985).

seperti dalam pertanian ada istilah *maro*, *nelu*, dan sebagainya. Hal demikian bisa terjadi karena arahan dari para ulama yang mengerti tentang bagi hasil.<sup>10</sup>

Lembaga keagamaan dalam Islam yang mempunyai peran penting dalam penguatan ekonomi umat di antaranya adalah Pesantren dan Masjid. Selama ini yang sudah dilakukan oleh banyak pesantren dalam upaya pengembangan usaha di bidang ekonomi adalah didirikannya koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Akan tetapi, kadang-kadang keberadaan kopontren kurang mendapat perhatian bahkan oleh kalangan pesantren sendiri. Ironis memang, tetapi ini mungkin bisa dimaklumi karena kegiatan kopontren hampir tidak pernah menyentuh agenda utama pondok pesantren. Itulah sebabnya, umumnya orang lebih tertarik pada proses belajar mengajar dalam pesantren, baik melalui pendidikan formal atau pengajian-pengajian, dari pada tertarik dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan koperasi di pesantren. Padahal upaya mendirikan koperasi di tengah-tengah pesantren ini justru bertujuan untuk menunjang keberhasilan program utama pesantren. Biasanya kendala utama pengembangan koperasi di pesantren-pesantren banyak disebabkan oleh adanya tradisi yang mengakar kuat di lingkungan pesantren. Pengasuh Pesantren yang memiliki otoritas paling tinggi kadang-kadang masih terlihat sangat mendominasi berbagai macam kegiatan di Pesantren, termasuk keberadaan koperasi yang sebenarnya sudah memiliki rumah tangga sendiri. Kondisi ini masih ditambah dengan terbatasnya sumber daya manusia, sehingga masih sedikit kita temukan santri yang benar-benar mau *concern* dan mumpuni di bidang perekonomian.

Sedangkan Masjid, jarang kita temui program nyata dari takmir masjid dalam rangka upaya pengembangan usaha di bidang ekonomi, baik diperuntukkan untuk pembangunan masjid sendiri maupun untuk kesejahteraan jamaah. Selama ini masih banyak masjid yang hanya mengedepankan aspek ibadah ritual dari pada aspek sosial, lebih-lebih ekonomi. Padahal di jaman Rasulullah, masjid bukan sekedar tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Bahkan strategi perangnya dimulai dari masjid. Sehingga tidak salah kalau para pendahulu kita membangun masjid, yang secara fisik, berdekatan dengan pasar dan kantor pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar terwujud hubungan yang sinergis antara

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 233.

masjid sebagai pusat keagamaan, pasar sebagai pusat ekonomi, dan kantor pemerintah sebagai pusat pemerintahan.

Secara garis besar, dalam penguatan ekonomi umat, lembaga keagamaan paling tidak mempunyai dua peranan penting yang kemudian perlu diimplementasikan dalam kegiatan nyata. Peranan tersebut adalah peranan yang terkait dengan *mauidhah hasanah*, dan peranan yang terkait dengan *uswatun hasanah*.

Peranan *mauidhah hasanah*, di antaranya bisa diwujudkan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan dengan memberikan motivasi kepada umat bahwa kuatnya ekonomi seseorang adalah perintah dalam ajaran Islam. Perlu juga penyadaran kepada umat terkait dengan konsep-konsep dalam ajaran Islam yang sering disalahpahami oleh sebagian orang, seperti qana'ah, tawakal, takdir, sabar, dan lain sebagainya.

Di samping itu, peranan *mauidhah hasanah* bisa juga diwujudkan dengan memberikan sosialisasi tentang ekonomi syari'ah. Sosialisasi ini mempunyai peran penting, di antaranya, *pertama*, menjelaskan kepada umat bahwa ekonomi syari'ah yang selama ini dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah pada dasarnya adalah penerapan *fiqh muamalah maliyah* yang selama ini sudah dipelajari di pesantren-pesantren salaf di Indonesia melalui kitab-kitab kuningnya. Sejumlah kitab fiqh sudah diajarkan di berbagai pesantren, tetapi, selama ini, baik para ulama maupun santri kesulitan untuk menerapkan ajaran fiqh tersebut dalam kehidupan ekonomi modern. *Kedua*, mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang sebelumnya sudah mengikuti aturan syari'ah, seperti dalam pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Fitrah ini dirusak dengan adanya sistem bunga yang mengharuskan segalanya pasti berhasil. sedangkan fitrah alam dan fitrah usaha mempunyai makna bahwa kegiatan ekonomi mempunyai sifat belum tentu dan harus diusahakan. *Ketiga*, meluruskan fitrah bisnis yang rusak, seperti meluasnya ungkapan "mencari duit secara haram saja susah, apalagi yang halal". Hal ini jelas akan menghalalkan segala cara dan mengesampingkan etika dan norma hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid, 238.

Sedangkan peranan *uswatun hasanah* yang bisa dilakukan oleh lembaga keagamaan dalam rangka menguatkan ekonomi umat, bisa diwujudkan di antaranya dengan cara, *pertama*, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Hal ini perlu dilakukan karena pertumbuhan dan perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia semakin menggembirakan dari waktu ke waktu, walaupun masih terdapat berbagai kendala dan kekurangan. Upaya sosialisasi dan pendayagunaan zakat secara lebih baik harus terus-menerus dilakukan, di samping melihat potensi zakat di Indonesia yang cukup besar, juga zakat ini (termasuk di dalamnya infaq dan sedekah) memiliki berbagai macam hikmah dan tujuan yang sangat mulia, di antaranya, zakat, infaq dan sedekah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq, terutama fakir-miskin, termasuk di dalamnya membantu di bidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi. Zakat, infaq, shadaqah bertujuan pula untuk mengurangi kesenjangan yang saat ini terjadi (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Di samping ZIS, perlu juga pendayagunaan wakaf. Jika dibandingkan dengan zakat, infak dan shadaqah, wakaf memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh mengingat dana yang ditransfer untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan sosial adalah keuntungan atau manfaatnya, sementara pada zakat, infak dan shadaqah lebih kepada asetnya sehingga bersifat konsumtif. Wakaf yang didefinisikan sebagai aset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama memiliki fungsi ritual (ubudiyah) dan sosial (kemasyarakatan).

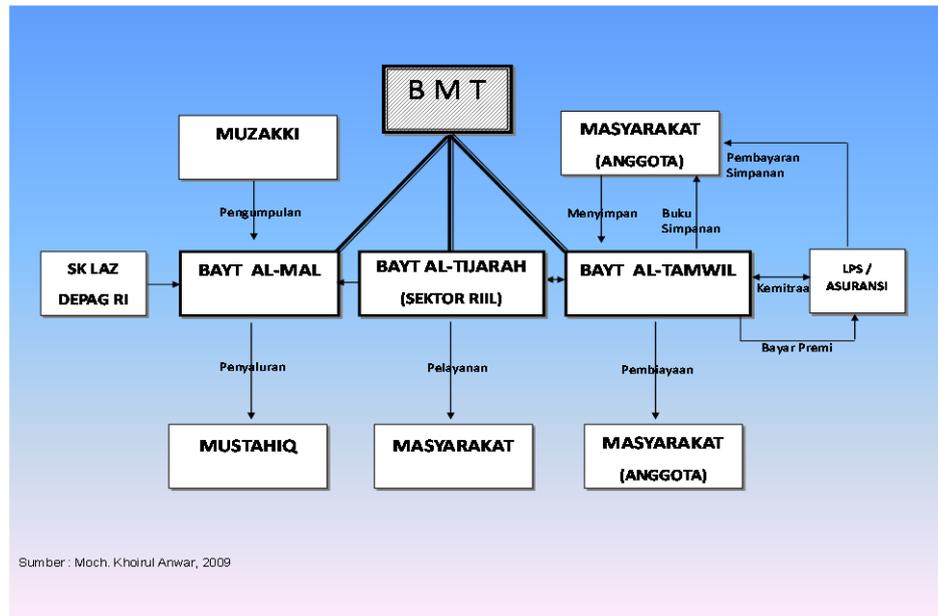
*Kedua*, peranan *uswatun hasanah* dari lembaga keagamaan dalam rangka penguatan ekonomi umat, bisa diwujudkan dengan mendirikan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di masing-masing lembaga keagamaan. BMT ini juga mempunyai usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dengan cara menampung dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada UMKM, terutama pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah seperti *murabahah*, *mudarabah*, *musharakah*, *qard*, dan lain sebagainya. BMT ini juga bisa berfungsi untuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

BMT adalah bagian dari lembaga keuangan mikro yang tidak dapat dipisahkan dari usaha-usaha penanggulangan kemiskinan. Bahkan perhatian dan usaha untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro terutama didasarkan pada motivasi untuk mempercepat usaha penanggulangan kemiskinan. Hal ini pulalah yang mendasari

berbagai lembaga internasional bergerak langsung dalam kegiatan keuangan mikro maupun dalam pengembangan lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan mikro dapat menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif. Peningkatan akses dan pengadaan sarana penyimpanan, pembiayaan dan asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Tanpa akses yang tetap pada lembaga keuangan mikro, hampir seluruh rumah tangga miskin akan bergantung pada kemampuan pembiayaannya sendiri yang sangat terbatas atau pada kelembagaan keuangan informal (rentenir, tengkulak, pelepas uang), yang membatasi kemampuan kelompok miskin berpartisipasi dan mendapat manfaat dari peluang pembangunan.

BMT sangat dimungkinkan didirikan di lembaga keagamaan, mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Hal ini disebabkan karena proses pendiriannya sederhana dan tidak memerlukan modal yang besar. Bahkan modal awal bisa diambilkan dari dana zakat, infaq, shodaqah dan wakaf, untuk dikelola secara profesional. Akan tetapi tentunya peruntukannya harus mengacu pada aturan syari'ah. Di samping itu, dengan mengedepankan ukhuwah dan ta'awun, BMT relatif bisa diterima oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Bagi lembaga keagamaan, keberadaan BMT juga bisa dijadikan sebagai media dakwah terkait dengan praktek-praktek ekonomi syari'ah, karena masih banyak umat muslim yang mengerti sistem ekonomi syari'ah hanya sebatas teori saja.

## KONSEP IDEAL BAYTUL MAL WA AL TAMWIL (BMT)



Operasional BMT yang dilakukan oleh lembaga keagamaan tersebut bisa memberikan pinjaman dana kepada pengusaha mikro dan kecil, sehingga mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang berkategori *economically active working poor* dan masyarakat *lower income*. Hal ini berpijak dari teorinya Robinson tentang klasifikasi masyarakat miskin bahwa masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi yaitu *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, *kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan *ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.<sup>12</sup>

Kelompok kedua dan ketiga itulah yang selama ini menjadi sasaran BMT dalam penguatan ekonomi umat, karena untuk memberdayakan kedua kelompok tersebut lebih efektif apabila digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau pemberian berbagai jenis pinjaman mikro. Kedua kelompok masyarakat tersebut akan cenderung tetap berpenghasilan rendah, bahkan bisa menjadi

<sup>12</sup> Wiloejo Wirjo Wijono, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Edisi Khusus, (Desember, 2005), 4.

kelompok *the extreme poor* jika kesulitan yang mereka hadapi dalam menjalankan aktifitas usaha tidak terselesaikan, terutama terkait dengan kebutuhan modal.

Dengan adanya operasional BMT yang dilakukan oleh lembaga keagamaan, maka paling tidak ada dua bentuk penguatan ekonomi yang dilakukan, yaitu *pertama*, meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya, ketika masyarakat mendapatkan pinjaman dana dari BMT, maka mereka akan mampu melanjutkan dan mengembangkan usahanya, dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatannya, terutama pendapatan rumah tangganya. Banyak studi yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dari pinjaman dana ini, seperti yang disampaikan oleh Mosley dalam Arsyad bahwa ada kecenderungan bagi pendapatan rumah tangga menjadi meningkat dalam periode program pinjaman berikut. Bahkan rata-rata peningkatan pendapatan rumah tangga mencapai 20,7 persen per tahun. Begitu pula yang terjadi di Grameen Bank, dengan lebih dari 2 juta anggota dan tingkat pemulihan pinjaman di atas 90 persen, pinjaman dana yang diberikan telah membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 29 persen di Bangladesh.<sup>13</sup>

*Kedua*, menciptakan lapangan pekerjaan. Dana pinjaman yang diberikan oleh BMT akan membuat pengusaha kecil bisa memulai usahanya. Dengan demikian akan ada banyak tenaga kerja yang terserap dalam menjalankan usaha mikro kecil tersebut, terutama penggunaan tenaga kerja keluarga. Di samping itu, pinjaman dana dari BMT tersebut juga bisa meningkatkan produktivitas kerja dari para pengusaha. Salah satu penelitian dari Malawi pedesaan menemukan bahwa dampak terhadap ketenagakerjaan terutama adalah disebabkan karena memulai membuka perusahaan baru.<sup>14</sup>

## Epilog

Islam sangat mengajarkan umatnya untuk berdaya di bidang ekonomi. Kalaupun ada konsep-konsep ajaran Islam yang seolah-olah mengajarkan ketidakberdayaan, itu disebabkan karena adanya kesalahan dalam memahami konsep tersebut, dan kesalahan dalam penggunaan dalil. Kalau konsep-konsep tersebut dipahami sebagai ajaran ketidakberdayaan, maka sama dengan *su'udzan* kepada Allah. Padahal kita diajarkan untuk selalu *husnudzan* kepada Allah. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, lembaga keagamaan mempunyai peranan yang

---

<sup>13</sup> Lincoln Arsyad, "Microfinance and Economic Development ; Evidence From Developing Countries" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, FE UGM, Vol. 21, No. 3, 2006, 246.

<sup>14</sup> *Ibid*, 247.

penting untuk meluruskan, karena kesalahpahaman ini juga bisa mengakibatkan ketidakberdayaan umat di bidang ekonomi.

Tanggungjawab lembaga keagamaan dalam menguatkan ekonomi umat bukan sekedar dalam tataran teoritis (*mau'idhah hasanah*), tetapi juga dalam tataran praktis (*uswatun hasanah*). Tataran teoritis bisa dilakukan dengan memberikan motivasi dan sosialisasi kepada umat betapa pentingnya berdaya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam tataran praktis, lembaga keagamaan bisa mendirikan BMT di masing-masing lembaganya. BMT ini di samping berfungsi untuk pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf secara profesional, juga sebagai bentuk usaha dalam rangka *profit oriented*. Dengan demikian, kita bisa menerapkan suatu bentuk kompetisi dalam bidang ekonomi yang merupakan bagian dari implikasi ayat Allah “*fastabiqul khairat*”. Pada akhirnya, umat Islam diharapkan menjadi kuat secara ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

al Nawawi, *Sahih Muslim Bi Sarh Imam al Nawawi*, VIII, Beirut : *Dar al-Fikr*, 1981.

al Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus : *Dar al Fikr*, 1986.

al-Jawziyah, Ibn al-Qayyim, *A'lam al Muwaqi'in*, III, Beirut : *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 1993.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Arsyad, Lincolin, "Microfinance and Economic Development ; Evidence From Developing Countries" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, FE UGM, Vol. 21, No. 3, 2006.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Islam ; Economic And Society*, London And New York : Kegan Paul International, 1994.

Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan Di Perkotaan; Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Thomas F.o'dea, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Wijono, Wiloejo Wirjo, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Edisi Khusus, Desember, 2005.